



Implementasi Pengelolaan Aset dan Inventarisasi Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang: Studi Pengalaman Magang

Deswita Aulia Utami

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: deswitaauliautami@gmail.com

Abstract. This article examines the implementation of asset management and inventory of goods at the Regional Secretariat of Padang Panjang City, which is based on the author's internship experience. This research uses descriptive qualitative methods to provide an in-depth description of asset administration practices in the field. The main focus of this study is the implementation of asset administration through the Goods Inventory Card (KIB) as the foundation of recording, data collection of vehicles and laptops, and other asset documentation. The study also emphasizes the importance of the barcode system for efficiency and transparency, and highlights the role of regular maintenance in maintaining asset sustainability. The results show that inventory digitization, barcode labeling, and maintenance activities significantly improve the effectiveness of asset control and realize good governance. Nonetheless, challenges are still found in terms of real-time data updates and uneven readiness of human resources (HR). Overall, the findings provide valuable insights into the alignment between the theory and practice of asset management in the public sector.

Keywords: Asset Management, Inventory, KIB, Barcode System, Public Administration

Abstrak. Artikel ini mengkaji implementasi pengelolaan aset dan inventarisasi barang di Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, yang didasarkan pada pengalaman magang penulis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang praktik administrasi aset di lapangan. Fokus utama studi ini adalah penerapan administrasi aset melalui Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai fondasi pencatatan, pendataan kendaraan dan laptop, serta dokumentasi aset lainnya. Studi ini juga menekankan pentingnya sistem barcode untuk efisiensi dan transparansi, serta menyoroti peran pemeliharaan rutin dalam menjaga keberlanjutan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi inventaris, pelabelan barcode, dan kegiatan pemeliharaan secara signifikan meningkatkan efektivitas kontrol aset dan mewujudkan tata kelola yang baik. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal pembaruan data secara real-time dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang belum merata. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan wawasan berharga tentang keselarasan antara teori dan praktik manajemen aset di sektor public.

Kata Kunci: Asset Management, Inventory, KIB, Barcode System, Public Administration

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai sumber daya penting, aset daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menunjang pelayanan publik secara optimal. Manajemen aset yang efektif bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan memastikan ketersediaan data yang akurat mengenai kekayaan daerah. Tanpa adanya pengelolaan yang sistematis, aset publik berisiko mengalami penyalahgunaan, kerusakan, atau pemanfaatan yang tidak maksimal, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Keteraturan dalam manajemen aset tidak hanya sekadar masalah teknis atau administratif, melainkan merupakan prasyarat

esensial untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (DI Kabupaten Serang. " 2011.)

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan aset daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan utama yang umum terjadi adalah ketidaktertiban dalam pengolahan data, yang seringkali menyebabkan data ganda, inkonsistensi, atau ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi fisik barang di lapangan. Selain itu, pemeliharaan aset yang tidak terjadwal dan pembaruan data yang tidak konsisten juga menjadi kendala signifikan yang dapat merusak nilai aset dan menghambat efisiensi operasional.

Pentingnya penggunaan Kartu Inventaris Barang (KIB) dalam proses pendataan aset tidak dapat diabaikan, meskipun sistem ini bersifat konvensional. KIB adalah instrumen administrasi dasar yang memastikan setiap aset yang dimiliki oleh instansi terdokumentasi dengan jelas dan terperinci. KIB mencatat informasi penting seperti nomor register, nama barang, asal-usul, tahun perolehan, dan harga. Pencatatan yang teliti pada KIB merupakan langkah awal untuk pengelolaan aset yang lebih baik, karena mempermudah proses audit dan pelaporan, serta membantu instansi dalam memonitor penggunaan aset guna mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, KIB tetap menjadi fondasi penting dalam penatausahaan aset di lingkungan pemerintahan, terlepas dari perkembangan teknologi yang ada (Universitas Islam, 2024).

Sebagai solusi atas keterbatasan sistem konvensional, implementasi sistem barcode aset menjadi langkah maju yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Barcode atau QR Code adalah inovasi pelabelan yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi manajemen aset, memungkinkan identifikasi dan pelacakan aset secara otomatis dan *real-time*. Dengan memindai kode batang, data aset dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem dengan cepat, akurat, dan meminimalkan kesalahan manusia (human error). Keberadaan sistem ini juga memperkuat visibilitas end-to-end, di mana semua pihak terkait dapat mengetahui lokasi dan kondisi aset setiap saat. Barcode secara signifikan menyederhanakan proses penghitungan dan audit, menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan akurat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan aset dipandang sebagai bagian dari amanah. Amanah diartikan sebagai segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Aset publik, yang merupakan milik negara dan hakikatnya milik rakyat, adalah sebuah titipan yang harus dikelola oleh pejabat pemerintahan dengan jujur dan adil. Pengelolaan aset ini bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral yang akan dipertanyakan di dunia dan juga di akhirat. Mengabaikan atau menyalahgunakan aset publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dari Allah dan masyarakat, yang merupakan dosa besar dan akan mendapatkan konsekuensi berat. Oleh karena itu, setiap pejabat yang memegang jabatan sebagai pengelola aset memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat. (Arif Chasannudin, et al.)

Inventarisasi barang merupakan proses penatausahaan yang sangat vital dalam administrasi pemerintahan. Menurut regulasi, inventarisasi barang milik daerah (BMD) harus dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam lima tahun, untuk mendapatkan data barang yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kartu Inventaris Barang (KIB) memegang peranan sentral dalam pencatatan aset negara dan daerah sebagai alat administrasi dasar. KIB adalah kartu yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap barang inventaris secara fisik dan administratif. Terdapat beberapa jenis KIB, seperti KIB A untuk tanah, KIB B untuk peralatan dan mesin, KIB C untuk gedung dan bangunan, dan seterusnya. Setiap KIB mencatat informasi detail seperti nomor urut, nama barang, kode barang, nomor register, tahun perolehan, asal-usul,

harga, dan keterangan mengenai kondisi fisik. Penggunaan KIB secara konsisten menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan pendokumentasian yang akurat, mempermudah audit, dan meminimalkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset.

Sistem barcode merepresentasikan evolusi manajemen aset menuju era modern. Barcode adalah kode batang yang dapat dibaca oleh mesin pemindai, yang mengkodekan data aset menjadi urutan garis-garis yang tersusun. Implementasi sistem barcode pada aset memungkinkan pelacakan yang lebih mudah dan akurat, karena teknologi ini menyediakan informasi *real-time* tentang lokasi dan kondisi aset. Keunggulan utama dari sistem ini adalah efisiensi operasional yang lebih tinggi, karena dapat menyederhanakan proses penghitungan dan mengurangi kesalahan entri data manual. Dengan demikian, sistem barcode tidak hanya membantu dalam inventarisasi, tetapi juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat (Yani Apriani 2023). Pentingnya pemeliharaan aset tidak hanya terbatas pada perbaikan saat terjadi kerusakan, tetapi merupakan bagian integral dari siklus hidup aset untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi nilainya.

Pada akhirnya, relevansi pengelolaan aset dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas adalah hal yang tidak terpisahkan. Manajemen aset yang efektif merupakan manifestasi nyata dari tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Setiap tahapan dalam siklus manajemen aset, mulai dari perencanaan hingga penghapusan, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan pengelolaan aset yang tertib, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keteraturan administrasi aset menjadi indikator penting bagi kinerja organisasi pemerintah, yang pada akhirnya akan membangun tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara alami dan memahami perilaku, persepsi, serta tindakan subjek penelitian melalui data berupa kata-kata, wawancara, maupun observasi. Lokasi penelitian adalah Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, dipilih karena penulis melakukan magang di sana sehingga memungkinkan pengamatan langsung dan interaksi berkelanjutan, yang memperkuat validitas data. Sumber data utama berasal dari pengalaman langsung penulis sebagai peserta magang, didukung oleh dokumen resmi seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), catatan kendaraan dinas, data perangkat elektronik, dan sistem barcode. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan makna dan pola dari proses pengelolaan aset dan inventarisasi barang di lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pencatatan aset, Kartu Inventaris Barang (KIB) digunakan sebagai instrumen utama. KIB berfungsi untuk mendokumentasikan setiap aset baru yang masuk atau aset yang sudah ada melalui pendataan berkala. Prosedur pencatatan dimulai dengan pengurus barang mencatat setiap barang ke dalam formulir KIB, kemudian dilakukan pengecekan antara data yang dicatat dengan kondisi fisik barang yang sebenarnya. Setelah data dipastikan akurat, KIB ditandatangani oleh atasan sebagai bentuk validasi, dan dokumen tersebut disimpan dalam arsip. KIB juga digunakan untuk mencatat perubahan data seperti kondisi, harga, atau lokasi aset.

Meskipun prosesnya terbilang manual, KIB menjadi pondasi dasar yang memastikan setiap aset memiliki catatan administratif yang jelas.

Tabel 1: Ringkasan Hasil Inventarisasi Aset Fisik

| Jenis Aset | Sistem Pencatatan | Metode Pendataan | Catatan Kunci |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Kendaraan Dinas | KIB, Dokumen Administrasi | Cek Fisik, Dokumentasi BPKB/STNK | Kepatuhan terhadap pajak, kondisi fisik, jadwal servis. |
| Laptop & Perangkat Elektronik | KIB, Barcode, Catatan Internal | Cek Fisik, Pencatatan Serial Number, Verifikasi Barcode | Kepatuhan, kondisi fisik, pembaruan data, perawatan software. |
| Peralatan Kantor & Mebel | KIB, Barcode (tertentu) | Cek Fisik, Pemasangan Barcode | Identifikasi dan pelacakan cepat, meminimalkan <i>human error</i> . |

Proses pendataan kendaraan dinas, baik mobil maupun motor, merupakan kegiatan yang memerlukan ketelitian tinggi untuk memastikan tertib administrasi. Kegiatan ini mencakup pendataan seluruh kendaraan yang dimiliki instansi dan pencatatan dokumen pendukung seperti BPKB, STNK, dan catatan perawatan berkala. Data yang dikumpulkan harus dicocokkan dengan kondisi fisik kendaraan di lapangan, termasuk nomor plat, nomor rangka, dan kondisi mesin. Pendataan yang akurat ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan aset, mempermudah pengawasan, dan memastikan kendaraan selalu dalam kondisi layak pakai untuk menunjang tugas operasional pegawai (Nopriyasman 2019).

Proses pemeliharaan aset yang diamati mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga aset dalam kondisi prima. Pemeliharaan kendaraan dinas, misalnya, dilakukan melalui servis berkala dan perawatan rutin yang dicatat dalam buku catatan. Untuk laptop dan perangkat elektronik, pemeliharaan juga dilakukan secara berkala, seperti pembersihan fisik dari debu, instalasi perangkat lunak antivirus, dan *back-up* data penting. Pemeliharaan yang baik, baik secara fisik maupun administratif, merupakan bagian dari pengamanan aset yang bertujuan untuk memperpanjang siklus hidupnya dan menghindari kerusakan yang tidak terduga. Upaya pemeliharaan ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam manajemen aset.

Kendala teknis yang masih ditemukan dalam proses pembaruan data inventarisasi menjadi tantangan nyata yang diamati. Meskipun beberapa aset sudah dilengkapi barcode, sistem inventarisasi belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi secara holistik. Data yang dikumpulkan di lapangan seringkali masih harus diinput secara manual ke dalam sistem, yang rentan terhadap kesalahan manusia dan menciptakan data ganda. Keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata, serta fragmentasi sistem informasi antar unit kerja, juga menghambat proses sinkronisasi dan pembaruan data secara *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi saja tidak cukup tanpa standarisasi data dan integrasi sistem yang memadai.

Analisis implementasi Kartu Inventaris Barang (KIB) menunjukkan bahwa instrumen ini merupakan fondasi vital dalam penatausahaan aset di Sekretariat Daerah. Sebagai alat

dokumentasi yang sederhana dan terstruktur, KIB memastikan setiap aset memiliki catatan administratif yang jelas dari waktu ke waktu. KIB sangat efektif dalam mempermudah proses audit karena menyediakan data yang terperinci dan dapat diverifikasi secara fisik. Namun, efektivitasnya terbatas pada pendokumentasian statis. Proses manual dalam pengisian dan pembaruan KIB rentan terhadap kesalahan manusia dan sulit untuk memberikan data secara *real-time*, yang menjadi hambatan dalam manajemen aset skala besar atau untuk pelacakan yang dinamis. Ketergantungan pada proses manual juga memicu masalah seperti data ganda dan ketidakkonsistenan yang menghambat akuntabilitas (widiyanto Andi,dkk 2023)

Keunggulan dan kelemahan sistem barcode menjadi aspek penting dalam perbandingan dengan KIB konvensional. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mempercepat proses inventarisasi dan mengurangi kesalahan *human error* secara signifikan. Barcode memungkinkan pelacakan aset secara *real-time* dan memberikan laporan yang lebih komprehensif, yang sangat berguna untuk audit dan manajemen rantai pasokan aset. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Penerapan awal sistem barcode membutuhkan investasi yang signifikan untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan SDM. Selain itu, data tidak dapat terbaca apabila label barcode rusak, dan sistem ini memerlukan teknologi optik yang terbatas pada jarak pendek, berbeda dengan teknologi nirkabel seperti RFID.

Tabel 2: Perbandingan Sistem Inventarisasi Konvensional vs. Digital

| Aspek | Sistem Konvensional (KIB) | Sistem Digital (Barcode) |
|----------------------------|--|--|
| Akurasi Data | Relatif tinggi jika diisi teliti, tetapi rentan <i>human error</i> | Sangat tinggi, meminimalkan kesalahan entri data |
| Kecepatan | Lambat, memerlukan pencatatan manual | Sangat cepat, cukup dengan pemindaian |
| Pelacakan | Tidak mungkin dilakukan secara <i>real-time</i> | Sangat mungkin, data langsung terintegrasi ke sistem |
| Real-time | | |
| Kebutuhan SDM | Memerlukan ketelitian tinggi dan waktu yang lama | Memerlukan literasi digital dan pelatihan teknis |
| Biaya | Biaya operasional rendah, tetapi inefisien | Memerlukan investasi awal yang signifikan |
| Potensi Human Error | Sangat tinggi karena proses manual | Sangat rendah, terotomatisasi |

Pentingnya pendataan kendaraan dinas secara akurat tidak dapat diremehkan, karena hal ini memiliki dampak langsung pada efisiensi operasional. Kendaraan dinas merupakan aset bergerak yang vital untuk menunjang mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas. Pendataan yang tertib, mencakup pencatatan fisik dan administratif seperti status pajak dan kondisi kendaraan, memastikan aset ini selalu siap pakai dan mencegah penyalahgunaan. Tanpa pendataan yang baik, instansi dapat mengalami kesulitan dalam mengawasi penggunaan kendaraan, yang dapat berujung pada inefisiensi biaya operasional dan risiko kehilangan aset. Pengawasan yang baik memungkinkan pimpinan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan aset. (Wicaksana, Harmono, and Yuniarti)

Dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan aset publik yang diamati selama magang dapat dianalisis sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Aset milik daerah adalah

titipan yang harus dikelola dengan jujur, adil, dan seoptimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Setiap kelalaian dalam pengelolaan, seperti ketidaktertiban data, pemborosan, atau tidak adanya pemeliharaan yang memadai, dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Hal ini memberikan dimensi moral dan etis yang kuat pada tugas-tugas administratif. Oleh karena itu, setiap staf, dari pengurus barang hingga pimpinan, memiliki tanggung jawab tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara spiritual untuk memastikan aset dikelola dengan baik.

Pengalaman magang ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan keilmuan mahasiswa dengan menjembatani teori dan praktik. Penulis dapat melihat secara langsung bagaimana konsep-konsep seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi diwujudkan dalam konteks nyata birokrasi pemerintah. Pemahaman teoretis tentang pentingnya inventarisasi dan pemeliharaan menjadi lebih mendalam setelah mengamati tantangan operasional dan faktor manusia yang menyertainya. Pengalaman ini mengajarkan bahwa keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan teknologi, melainkan juga oleh komitmen, kapasitas, dan integritas para pelaksana di lapangan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi perbaikan administrasi aset di pemerintahan daerah. Temuan mengenai kendala teknis dan SDM menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk investasi pada infrastruktur teknologi yang menunjang pengelolaan data secara digital. Perbaikan sistem harus sejalan dengan peningkatan kesiapan SDM agar inisiatif digital tidak kehilangan arah dan dapat memberikan manfaat maksimal.

Berdasarkan temuan di lapangan, rekomendasi pengembangan sistem inventarisasi berbasis teknologi digital menjadi solusi yang strategis. Instansi dapat mempertimbangkan adopsi sistem informasi manajemen aset berbasis web atau *cloud* yang terintegrasi secara menyeluruh. Sistem seperti ini harus memiliki fitur pelacakan *real-time* menggunakan barcode atau QR Code, kemampuan analisis data, dan notifikasi otomatis untuk pemeliharaan atau stok rendah. Dengan adanya sistem terintegrasi, instansi dapat mengatasi masalah fragmentasi data, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan memperkuat prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan aset dan inventarisasi barang di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah berjalan cukup efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Penggunaan Kartu Inventaris Barang (KIB) terbukti menjadi fondasi yang kokoh untuk pendokumentasian aset, sementara proses pendataan kendaraan dinas dan laptop memastikan setiap barang memiliki catatan yang jelas. Inovasi seperti implementasi sistem barcode juga menunjukkan upaya modernisasi yang signifikan, yang mampu menyederhanakan proses inventarisasi dan meningkatkan akurasi data. Seluruh kegiatan ini, yang didukung dengan pemeliharaan rutin, menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan daerah. Namun demikian, efektivitas sistem yang ada masih dihadapkan pada beberapa kendala yang perlu segera diatasi. Keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya integrasi sistem informasi menyebabkan proses pembaruan data inventaris seringkali tidak dapat dilakukan secara *real-time*. Selain itu, tantangan utama juga datang dari

aspek sumber daya manusia, di mana masih ditemukan kendala terkait literasi digital dan kurangnya pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengelola aset. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem digitalisasi yang terintegrasi secara menyeluruh dan investasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan yang berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan aset yang lebih modern, transparan, dan akuntabel di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Yani. “PERMASALAHAN DAN UPAYA DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH BUMN (Studi Kasus PT PLN (Persero)).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 227–35. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4142>.
- Arif Chasannudin, Khilda Alfiani Aqiliya, Ayyun Afroh, and Ahmad Miftahus Syifa. “Pendampingan Penggunaan Slims (Senayan Library Management System) Dalam Upaya Revitalisasi Perpustakaan Sekolah Dasar.” *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian Dan Kemitraan Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 17–32. <https://doi.org/10.59246/alkhidmah.v1i4.501>.
- Di, Studi, Dinas Pengelola, D A N Aset, and Daerah Kabupaten. “DI KABUPATEN SERANG,” 2011.
- Ilham, Hafidatul, and Ridwan Sahroni Hisam. “Optimalisasi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Dalam Rangka Mendukung Perencanaan Program Pendidikan Yang Berkualitas Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara” 1 (2025): 781–85.
- Islam, Universitas, Sultan Agung, Fakultas Ekonomi, and Program Studi. “DIGITAL SIMANJA DAN SIPD DALAM INTERN ASET TETAP PEMERINTAH Nely Agus Setiawati,” 2024.
- Nopriyasman. “Pariwisata Sumatera Barat Dalam Bingkai Sejarah Dan Budaya.” *Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam*, no. September (2019): 1–14.
- Rahayu, Sri, Salman Jumaili, Ferdiaz Saudagar, Pradita Eko, and Prasetyo Utomo. “Penguatan Manajemen Aset Tetap Dan Akademik Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Layanan Pendidikan” 3, no. 2 (2024): 86–94. <https://doi.org/10.22437/jupema.v3i2.37403.86>.
- Saka Nano Suta, widiyanto Andi, Hanafi Mukhtas, Ramadan Diva Radzi. “Optimalisasi Pemanfaatan Dan Pengelolaan Aset Kamar Jenazah Melalui Sistem Web Di RS Dr. Soedjono.” *IJESPG Journal* 1, no. 2503–3212 (2023): 1–11.
- Sarana, Pkm-manajemen Inventarisasi, D A N Prasarana, M A Syarif, and Hidayatullah Paiton. “Pkm-Manajemen Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Di Ma Syarif Hidayatullah Paiton Probolinggo.” 03, no. 03 (2024): 11–23.
- Wicaksana, Arif, Harmono Harmono, and Sari Yuniarti. “Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Malang.” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5514>.